

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|----------|
| Media Online | |
| Media Cetak | Pos Kota |

DPRD Minta Pemprov Cari Alternatif Pendanaan RDF

◆ Jangan Jadi Beban Anggaran Daerah

JAKARTA (Poskota) - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mencari alternatif pendanaan untuk membangun pabrik pengolahan sampah menjadi bahan bakar (Refuse Derived Fuel/ RDF Plant). Langkah itu diperlukan agar tak ada lagi anggaran yang menjadi beban keuangan daerah.

"Saya mengkhawatirkan permohonan pinjaman yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta akan menambah beban keuangan daerah. Karena itu kami meminta untuk mencari alternatif pendanaan," kata Prasetio usai Rapat pimpinan gabungan DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (21/8).

Prasetio meminta agar Tim Anggaran



Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Poskota/ist

Pemerintah Daerah (TAPD) mengurungkan niat melakukan pinjaman daerah ke Pemerintah Pusat. Permohonan pinjaman daerah ini sesuai surat Gubernur DKI Jakarta dengan nomor 435/UD.02.03 yang ditujukan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta berencana mendapatkan pinjaman daerah dari BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp1 triliun. Selain dinilai menambah beban keuangan daerah, dikhawatirkan adanya kemungkinan

terburuk mengorbankan kepentingan warga Jakarta.

Dengan demikian, Prasetio meminta Joko Agus Setyono selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengkaji kembali skema pembiayaan pembangunan RDF Plant yang akan dibangun di Rorotan, Jakarta Utara. TAPD diharapkan mampu menyisir ulang Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2024.

Meski demikian,

Prasetio menyatakan dirinya menyetujui apapun upaya Pemprov DKI untuk menangani sampah Jakarta yang sudah masuk ke dalam kategori darurat. Apalagi volume sampah di TPST Bantargebang, Bekasi sudah melebihi kapasitas penampungan yang seharusnya hanya sampai 21,9 juta meter kubik. "Bantargebang ini tinggal tunggu meledak saja. Ini sudah stadium empat ini, bisa jadi stadium enam," jelasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD DKI Ja-

karta Khoirudin juga sependapat lantaran menurutnya melakukan pinjaman daerah adalah jalan terakhir ketika suatu masalah tidak lagi memiliki jalan keluar. "Ada jalan lain misalnya melakukan penghematan di beberapa program atau memaksimalkan pendapatan yang ada di 13 jenis pajak maupun retribusi," ungkap Khoirudin.

Sementara itu, Ketua TAPD DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan akan melakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2024 seperti yang disarankan DPRD DKI Jakarta.

Pada kesempatan itu, Agus menyatakan pinjaman daerah itu adalah skema terbaik sebelum KUA-PPAS APBD tahun 2024 disahkan pada akhir tahun 2023. "Kita ada satu alternatif yang lebih nyaman namun dengan berbagai macam pertimbangan jangka panjang sehingga ketua DPRD DKI Jakarta melalui rapat dengan DPRD tadi tidak menyetujui," terang Joko. (*/lfn)